

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DALAM BIDANG WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Disajikan Oleh:
Drs. Miko Siregar, M.Si

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL. :	14 MARET 2008
SUMBER HARGA :	H0
COLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	47/Hel/2008- K1 (1)
KLASIFIKASI :	379 SIR K.1

Disampaikan Menyambut Peserta Kuliah Kerja Nyata Wajar 9 Tahun
Mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk Mentawai
di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tanggal 27 Juni 2007

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DIKPORA KABUPATEN MENTAWAI
DALAM BIDANG WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN^{1*}**

**Drs. Miko Siregar, M.Si
(Dinas Dikpora Mentawai)**

A. Pendahuluan

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah kabupaten muda dan harus berpacu dalam pembangunan pendidikan berdasarkan suatu pola umum bersama-sama kabupaten lain di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia umumnya. Pola umum dimaksud merupakan aturan main bersama secara nasional bernama Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan/atau Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah 2004-2009. Dengan kata lain, dalam usianya yang singkat itu, kebijakan pemerintah Mentawai pada tahun periodik dalam bidang pendidikan harus mengacu pada kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional, di satu sisi, dan dengan memperhitungkan kompleksitas kondisi lokalnya di sisi lain. Kondisi lokal Mentawai terkualifikasi dalam dua kategori umum, yakni sebagai kabupaten tertinggal tetapi juga terisolir dari pusat kehidupan modern.

Sebagaimana gencar dipublikasikan oleh pemerintah, rencana jangka panjang Depdiknas ditetapkan meliputi empat tema strategis pembangunan pendidikan, antara lain (1) peningkatan kapasitas modernisasi, (2) penguatan pelayanan, (3) daya saing regional, dan (4) daya saing internasional (Depdiknas, 2007:36). Sementara itu, sasaran umum pembangunan pendidikan nasional menurut Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 adalah "Peningkatan Akses

^{1*} Disampaikan Menyambut Peserta Kuliah Kerja Nyata Wajar 9 Tahun Mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk Mentawai di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tanggal 27 Juni 2007

Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas” (Perpres No.7 tahun 2005).

Jika diperhatikan lebih rinci, sasaran RPJM 2004-2009 dalam bidang pendidikan ditandai oleh indikator seperti (1) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, (2) meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, (3) meningkatnya kualitas pendidikan, (4) meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan (5) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

Masing-masing sasaran tersebut ditandai dengan indikator-indikator khusus yang lebih spesifik. Pencapaian sasaran umum pembangunan jangka menengah dalam pendidikan tersebut ditetapkan dalam rincian indikator tertentu dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur masyarakat. Sebagai contoh dapat kita tampilkan cuplikan target kinerja pendidikan berdasarkan RPJM 2004-2009 dalam bidang Program Wajib Belajar 9 Tahun. Perkiraan kelompok usia sekolah 13-15 tahun secara nasional pada tahun 2004/05 adalah sebesar 13.033.00 dengan jumlah peserta didik SMP/ sederajat sebesar 10.467.300; dan jumlah proyeksi usia 13-15 ini pada tahun 2009/10 diperkirakan menjadi sebesar 12.440.200 dengan jumlah peserta didik sebesar 12.202.700 (RPJM, 2004:284). Indikator capaian target menurut data di atas adalah meningkatnya lulusan SD/ sederajat/ Paket A ke jenjang SMP/ sederajat/ Paket B menjadi 90% dari jumlah kelompok usia. Secara kuantitatif berarti siswa kelas baru ditingkatkan dari 3,67 juta siswa pada tahun 2004/05 menjadi 4,04 juta pada tahun 2009/10.

Juga dikemukakan pemahaman bahwa konsepsi mendasar yang menjiwei rencana pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas bahwa pendidikan ditempatkan sebagai *salah satu pilar terpenting dalam peningkatan kualitas manusia*. Bahkan juga kinerja

pendidikan, yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan angka melek aksara, digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi (RPJM, 2004-2009:279).

Dalam implementasinya, pembangunan pendidikan nasional di Indonesia diharapkan dijalankan dengan prinsip-prinsip mendasar meliputi pemerataan, kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen. Selain itu, dalam pelaksanaannya diisyaratkan pentingnya mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on Child*), Tujuan Pembangunan Universal (*Millenium Development Goals (MDGs)*) dan Pembangunan Berkelanjutan Global (*World Summit on Sustainable Development*).

Dengan memperhitungkan rencana umum seperti di atas, dan dengan bergulat dengan kompleksitas kondisi lokal Mentawai, kebijakan pendidikan di Mentawai menjadi suatu urusan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan terencana.

B. Gambaran Umum dan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Berbagai faktor lokal mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pendidikan, seperti keadaan geografis, infrastruktur, ekonomi, struktur sosial dan corak kebudayaan. Keadaan ini akan dikemukakan secara ringkas untuk memahami keadaan pendidikan di Mentawai.

1. Gambaran Umum

Mentawai secara juridis menjadi kabupaten terwujud pada penghujung tahun 1990-an. Sebelumnya daerah ini merupakan sebuah wilayah kecamatan dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Perkiraan statistik mutakhir menunjukkan

jumlah penduduknya tidak lebih dari 70 ribu jiwa. Mereka terdiri dari sukubangsa Mentawai, Minangkabau, Batak, Jawa dan beberapa sukubangsa lainnya. Mereka bermukim terpencar pada empat pulau besar, meliputi Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora dan Siberut. Masing-masing pulau besar ini dikelilingi pulau-pulau kecil yang sebagiannya berpenghuni menetap.

Secara administratif, Mentawai terdiri dari empat kecamatan, yakni Pagai Utara dan Pagai Selatan menjadi satu kecamatan Pagai Utara-Selatan, Sipora menjadi satu kecamatan Sipora dan Siberut menjadi Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Selatan. Keempat keamatan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama diproyeksikan menjadi sepuluh kecamatan sehingga rentang kendali pembangunan makin dekat dengan sasaran.

Secara geografis, Kepulauan Mentawai terhampar sekitar seratusan kilometer di Lautan Indonesia bagian barat Sumatera Sumatera. Pemerintahannya berpusat di Tuapejat yang berlokasi di bagian utara Pulau Sipora. Mobilitas geografis pada keseluruhan wilayah Mentawai sekitar 95% hanya dapat dilakukan dengan transportasi air, baik laut maupun sungai. Merupakan fakta, apabila penduduk pedalaman secara ekonomi makin kurang mampu, maka sebaliknya, biaya transportasi orang dan barang ke area-area pedalaman secara signifikan makin meningkat dan mahal. Kesukaran mobilitas orang dan barang ini juga berdampak dengan kesukaran infrastruktur lain, yakni sarana komunikasi antar unit-unit lembaga lokal publik yang belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang telekomunikasi.

Mobilitas geografis dari Padang menuju Tuapejat dapat dilakukan dengan pesawat berbadan kecil dalam waktu 35 menit dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Rokot, bandara setempat yang berada di kecamatan Sipora. Namun demikian, dari Rokot ke Tuapejat harus ditempuh sekitar satu jam melalui boat karena jalan tembus darat baru bisa dilalui dengan jalan kaki. Jika dengan kapal kayu atau ferry, perjalanan dari Padang (Bungus atau Muara) - Tuapejat menghabiskan

waktu sekitar 10 jam. Selanjutnya, dari Tuapejat ke pusat wilayah kecamatan paling utara, dan atau ke pusat kecamatan paling selatan juga memakan waktu paling sedikit 10 jam. Jika lebih jauh, dari masing-masing pusat kecamatan ke sebagian besar desa-desanya harus dilalui dengan boat berjam-jam atau jalan kaki satu-dua hari.

Meski Mentawai secara geografis berada di wilayah Sumatera Barat, namun secara kultural orang Mentawai mempunyai suatu sistem kebudayaan dan struktur masyarakat tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan dan struktur masyarakat Minangkabau. Mereka mengenal dan menganut sistem patrilineal dengan kesatuan sosial berpusat pada *uma*, yang secara harfiah berarti rumah suatu kelompok dalam suatu garis keturunan. Secara luas, hal ini berarti suatu tempat yang didiami beberapa ratus manusia yang masih berhubungan satu sama lain dalam hal keturunan. Namun demikian, kawin-mawin antara orang Mentawai dengan orang Minangkabau dan sukubangsa lainnya merupakan suatu yang lazim.

Menurut tradisi klasik, sukubangsa Mentawai juga mengenal sistem kepercayaan tradisi yang disebut *Arat Sabulungan*, secara harfiah berarti kumpulan dan himpunan dari upacara-upacara. Secara luas berarti suatu kebudayaan (*adat*) yang menuntun cara hidup, dan yang dengannya orang Mentawai berhadapan dengan lingkungan kehidupannya (Coronese, 1986). Dengan warisan tradisional itu, dalam waktu yang cukup lama sukubangsa Mentawai telah mengalami involusi, yakni menutup diri diri terhadap dunia luar dengan konsekuensi sosiokultural bahwa mereka mengalami pengrumitan ke dalam diri masyarakat dan kebudayaan mereka sendiri. Keadaan inilah yang menyebabkan muncul dan terbentuknya suatu pola kehidupan yang khas Mentawai.

Para ahli, seperti Reimar Schefold (1991) meramalkan bahwa keadaan involusi ini akan berubah menuju suatu keadaan devolusi, yakni orang-orang Mentawai akan membuka diri terhadap perubahan alamiah yang dirangsang oleh adanya faktor luar, tetapi bukan dalam bentuk revolusi. Kecenderungan berarti atas gejala ini

sudah ditunjukkan oleh gejala bahwa dengan makin menyusutnya penghayatan terhadap sistem kepercayaan tradisional, muncul pula kecenderungan lain yakni makin besarnya penduduk asli menganut agama Kristen, Katolik dan Islam, serta sistem nilai nasional dan global.

Jika diamati lebih dalam, orang Mentawai sejak lama pada dasarnya tidak dituntut oleh alamnya untuk bekerja keras. Sagu sebagai bahan makanan pokok tumbuh subur di dekat pemukiman, ikan dapat diperoleh dengan sarana tankap tradisi, kebutuhan daging dapat diperoleh dengan berburu. Tanaman sayuran dapat diperoleh dengan upaya seadanya. Hasil pohon kelapa, cengkeh, nilam sejak lama telah mereka kenal sebagai tanaman tradisional yang hasilnya dibarterkan dengan berbagai kebutuhan produk industri modern, seperti pakaian, rokok, parang dan sebagainya. Mereka menukarkan hasil ladang mereka dengan barang dagangan pasar tanpa memikirkan keuntungan menurut ekonomi pasar.

Dapat dikatakan, kondisi kecukupan pemenuhan produk alamiah ini menyebabkan lambatnya etos kerja masyarakat yang berorientasi pada kinerja dan profit di tengah masyarakat. Dengan kata lain, sejak lama pendidikan belum menjadi orientasi investasi di tengah masyarakat. Sejak kemerdekaan, secara berangsur masyarakat telah bergaul langsung atau tidak langsung dengan dunia luar, dan secara berangsur mengenai arti uang dan pendidikan dalam kehidupan.

Pendidikan formal di Mentawai sejak lama hanya dikenal kalangan terbatas di pusat-pusat kota pesisir. Dalam keadaan sekarang, sekolah negeri dan swasta bersama-sama mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Statistik pendidikan tahun 2007 menunjukkan di Mentawai terdapat 97 Sekolah Dasar, 5 SMPN, dan 5 SMAN. Selain itu, terdapat beberapa TK/SD/SMP/ sederajat berstatus yang dikelola masyarakat. Secara statistik jumlah data penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan melek huruf tahun 2007 adalah seperti tertera pada tabel berikut.

Sumber pendanaan BOP ini berasal dari Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.1.2 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dan Pengadaan Perpustakaan, Buku Teks dan Nonteks Pelajaran

Pada tahun 2007, rencana definitif dinas Pendidikan Mentawai dalam bidang ini ditetapkan pada 47 sekolah dasar dengan nominal dana masing-masing sekolah sebesar 250 juta. Dana ini dialokasikan sebesar 60% untuk fisik dan 40% nonfisik. Direncanakan pada tahun 2009, seluruh atau 105 sekolah dasar telah mengalami rehab, memiliki perpustakaan dengan ketersediaan buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Upaya ini merupakan penyediaan sarana penunjang pendidikan yang layak.

2.1.3 Penyediaan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru

Penyediaan prasarana pendidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) diupayakan dalam rangka pemerataan dan perluasan di tingkat SMP/ sederajat untuk menampung jumlah lulusan SD. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di tingkat SD dilakukan dengan memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.

2.1.4 Perintisan Pendidikan Dasar 9 Tahun Satu Atas (SD dan SMP Satu Atap).

Program ini dilaksanakan dengan penambahan tingkat kelas (extended classes) untuk penyelenggaraan pendidikan menengah pertama pada sekolah terpencil, serta penduduk yang jarang dan terpencar. Di Mentawai direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan 2 pengembangan SD dan SMP Satu Atap yang berlokasi pada salah satu desa di kecamatan Pagai Utara-Selatan dan Siberut Selatan.

2.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Tabel 1.
DATA PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS
KELAMIN DAN MELEK HURUF 2007

NO	KECAMATAN	KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS					
		DAPAT			TIDAK		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1	PUS	17503	6926	24429	927	856	1783
2	SIPORA	4810	4441	9251	595	549	1144
3	SIBERUT SELATAN	5115	4722	9837	632	584	1216
4	SIBERUT UTARA	4785	4416	9210	591	546	1137
	JUMLAH	22213	20505	52718	2745	2535	5280
			89 %			11%	

Sumber: Bidang Program Dikpora Mentawai

2. Kebijakan Pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun

Program Wajar 9 Tahun ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik secara formal maupun nonformal yang mencakup sekolah dasar (SD/ sederajat) dan Pendidikan Nonformal (PNF) kesetaraan SD dan SMP.

2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Program ini dilaksanakan dengan menupayakan menarik semua usia sekolah yang sama sekali belum pernah sekolah, menarik kembali siswa yang putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.

2.1.1 Pemberian bantuan biaya operasional sekolah (BOP)

Pada tahun 2006, pemberian BOP ini dilaksanakan dengan menyalurkan langsung dana ke rekening sekolah, sedangkan pada tahun 2007 pemberian bantuan dilaksanakan dengan menyalurkan langsung sarana kebutuhan pendidikan ke 105 SD (Negeri dan Swasta).

Program ini dilaksanakan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Secara umum pemahaman guru-guru sekolah dasar di Mentawai mengenai KTSP masih belum jelas dan tenaga terlatih yang memahami konsep ini masih sangat terbatas. Ke depan, pengembangan model kurikulum ini akan memperhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah, akar sosiokultural komunitas setempat, perkembangan iptek, lapangan kerja, dan lain-lain. Pada jenjang Dikdas muatan kurikulum akan diarahkan pada kecakapan dasar, kecakapan intrapersonal dan kecakapan interpersonal. Kecakapan dasar ditekankan pada kecakapan berkomunikasi, seperti membaca, menulis, menyimak, dan menyampaikan pendapat. Kecakapan intrapersonal mengarah pada pembinaan kemampuan pemahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri dan tanggung jawab. Kecakapan interpersonal diarahkan untuk membina kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, bernegosiasi, dan kemampuan mengambil keputusan.

2.3 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Dalam bidang ini akan diupayakan pengembangan kapasitas dewan pendidikan kabupaten (DKP) dan komite sekolah (KS), serta komite pendidikan luar sekolah (KPLS). Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengelola pendidikan dasar. Upaya ini sekaligus merupakan upaya untuk mengembangkan penerapan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat secara lebih maksimal.

Termasuk dalam bidang ini, program yang menjadi pemikiran adalah pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Hal ini merupakan upaya pendukung yang menunjang keberhasilan upaya mengukur sejumlah indikator poenting perluasan mutu, mutu, dan efisiensi sesuai dengan standar nasional pendidikan dasar.

3. Program Pendidikan Nonformal

Program ini juga terkait dengan Wajar 9 Tahun. Program ini diarahkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan nonformal. Mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, serta pengembangan sikap dan keperibadian. Dengan demikian, pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Dalam upaya mencapai atujuan tersebut, berbagai program PNF yang sedang dan akan dikembangkan pada tahun 2007 dan 2008 oleh Diknas Mentawai meliputi (1) pendidikan kesetaraan yang diarahkan pada anak usia Wajar Dikdas 9 Tahun untuk mendukung suksesnya Wajar Dikdas beserta tindak lanjutnya, setara SMU, (2) pendidikan keaksaraan yang diarahkan pada pendidikan keaksaraan fungsional serta penurunan buta aksarana usia 15 tahun ke atas secara signifikan pada beberapa tahun ke depan, (3) peningkatan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, (4) pendidikan kecakapan hidup dalam kerangka hidup mandiri, (5) pendidikan pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kecakapan hidup dan pengarusutamaan perempuan di bidang pendidikan, (6) peningkatan budaya baca sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan peserta diri yang telah bebas buta aksara, dan (7) memperkuat dan merevitalisasi kelembagaan unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

3. Penutup

Berbagai masalah menyangkut pembangunan pendidikan di Mentawai masih menghadang. Keadaan

geografis, infrastruktur yang minim, kecukupan sumberdaya manusia secara kuantitatif dan kualitatif, latar belakang kebudayaan dan kebaruan pengalaman dalam membina pemerintahan, dan kesenjangan pembiayaan secara bersama-sama menjadi variabel yang berpengaruh terhadap percepatan pembangunan pendidikan di Mentawai.

Perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, kinerja upaya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendidikan dan partisipasi masyarakat merupakan aset yang dapat diharapkan berdampak untuk mewujudkan peningkatan program pendidikan Wajib Dikdas 9 Tahun di Mentawai pada beberapa tahun ke depan.

DAFTAR BACAAN

Depdiknas,

2007 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional
2005-2009. Jakarta: Depdiknas

Cronese, Stefano

1986 Kebudayaan Suku Mentawai. Jakarta: Grafidian Jaya.

Perpres RI Nomor 7 Tahun 2005

2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004-2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Schefold, Reimar

1991 Mainan Bagi Roh. Jakarta: Balai Pustaka.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG